

Pola Pemolisian Dalam Mengendalikan Perilaku Hooliganisme: Studi Kasus Bonek Mania

Happy Nawang Kuncoro

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta, Indonesia

Email: hnkuncoro@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pola pemolisian yang diterapkan oleh Polrestabes Surabaya untuk mengatasi hooliganisme yang dilakukan oleh suporter Bonek Mania, dengan fokus pada pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Melalui pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi preemtif yang melibatkan komunikasi intensif dengan komunitas suporter dan edukasi mengenai sportivitas telah efektif dalam meredam kekerasan. Meskipun pengamanan selama pertandingan terbukti berhasil, tantangan muncul dalam pengelolaan potensi konflik di luar hari pertandingan dan di media sosial. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi pengembangan strategi pemolisian yang lebih adaptif, dengan melibatkan kolaborasi yang lebih erat antara polisi dan komunitas suporter untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

Kata Kunci: Hooliganisme, Polrestabes Surabaya, Bonek Mania, Pemolisian Preemtif.

ABSTRACT

This study analyzes the policing pattern applied by the Surabaya Police to overcome hooliganism carried out by Bonek Mania supporters, focusing on preemptive, preventive, and repressive approaches. Through qualitative approaches and case study methods, data is collected through interviews, observations, and document studies. This study shows that preemptive strategies that involve intensive communication with the supporter community and education about sportsmanship have been effective in reducing violence. While security during matches has proven to be successful, challenges arise in managing potential conflicts outside of match days and on social media. The findings of this study are expected to provide insights for the development of more adaptive policing strategies, involving closer collaboration between police and the supporter community to create a safer and more orderly environment.

Keywords: Hooliganism, Surabaya Police, Bonek Mania, Preemptive Policing.

PENDAHULUAN

Dampak hooliganisme terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat mencakup ancaman bagi individu yang terlibat baik fisik maupun psikis. Selain itu, perilaku ini sering kali menyebabkan kerugian material, seperti kerusakan fasilitas publik, infrastruktur stadion, dan kendaraan, yang menimbulkan beban ekonomi tambahan bagi pemerintah daerah (Milojević et al., 2013). Kerugian ini tidak hanya mempengaruhi citra positif olahraga yang seharusnya bernuansa sportif, tetapi juga dapat memperburuk hubungan antara suporter, masyarakat dan pemerintah daerah (Stott & Pearson, 2016).

Insiden hooliganisme oleh Bonek Mania sering kali melibatkan kekerasan terhadap suporter lawan, aparat, dan fasilitas publik. Pada 5 Mei 2016, sekitar 1.000 anggota Bonek melakukan aksi sweeping terhadap kendaraan berplat Malang di Gerbang Tol Suramadu, Surabaya, yang mengintimidasi suporter lawan dan masyarakat. Insiden serupa terjadi pada 27 Agustus 2022, di Stasiun Pasar Turi, Surabaya, saat Bonek melakukan sweeping terhadap suporter Persija. Polisi juga menjadi korban dalam beberapa bentrokan, seperti pada 6 Mei 2016, di Jalan Kenjeran, yang mengakibatkan beberapa aparat terluka, serta pada 22 Mei 2022, di Stadion Gelora Bung Tomo, yang menyebabkan seorang anggota polisi terluka. Kerusuhan yang dipicu oleh kekecewaan terhadap hasil pertandingan juga merusak fasilitas publik, seperti yang terjadi pada 15 September 2022, setelah pertandingan Persebaya Surabaya vs. Rans Cilegon United, di mana Bonek merusak fasilitas stadion dan Persebaya Store di Surabaya, mengakibatkan kerugian material yang signifikan.

Stott & Reicher (2016) lebih lanjut mengungkapkan bahwa keterlibatan suporter dalam aksi kekerasan kerap dipicu oleh faktor sosial yang kompleks, termasuk perasaan ketidakadilan dan reaksi terhadap tindakan otoritas yang dianggap provokatif. Dalam konteks hooliganisme, para suporter sering kali merasakan adanya ketidakadilan, terutama ketika mereka merasa ditekan atau diperlakukan secara represif oleh aparat keamanan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa hubungan negatif antara suporter dan otoritas keamanan justru dapat memperburuk situasi, mendorong suporter untuk bersatu dan melawan. Ini memperlihatkan bahwa tindakan keras dari pihak keamanan terhadap suporter bisa menjadi bumerang, memicu solidaritas agresif dalam kelompok suporter dan memperbesar risiko kerusuhan.

Penelitian oleh Stott & Pearson (2016) juga menambahkan bahwa interaksi antara suporter dan pihak keamanan memainkan peran yang sangat krusial dalam dinamika kerusuhan suporter. Temuan dalam penelitian tersebut—menunjukkan bahwa ketika polisi mengambil pendekatan yang dianggap represif, sering kali menimbulkan respons permusuhan dari suporter. Sikap represif, seperti penggunaan kekerasan fisik atau pembubaran massa secara paksa, seringkali dipandang sebagai provokasi yang tidak perlu, sehingga memperparah ketegangan (Stott & Pearson, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Wibowo (2018), yang menunjukkan bahwa konflik meningkat saat aparat keamanan menerapkan tindakan yang dianggap berlebihan oleh suporter. Di Indonesia, fenomena hooliganisme masih menjadi masalah serius, terutama karena kondisi sosial dan budaya yang mendorong loyalitas tinggi di kalangan suporter. Wibowo juga mengungkapkan media sosial kini berperan besar dalam memperkuat identitas kelompok suporter dan menyalurkan provokasi antar supporter (Wibowo, 2018).

Media sosial sebagai mana ditemukan dalam penelitian Wibowo (2018) memberi suporter platform untuk mengekspresikan dukungan dan memperkuat identitas kolektif, namun juga membuka ruang untuk provokasi dan ancaman antar kelompok. Hal ini relevan dalam konteks Bonek Mania, di mana platform daring sering kali digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan yang meningkatkan semangat kolektif, yang pada saat tertentu dapat memicu aksi kekerasan di dunia nyata. Penelitian Wibowo ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat memperkuat ikatan kelompok dan solidaritas, tetapi juga meningkatkan risiko bentrokan ketika digunakan untuk menyalurkan ketidakpuasan terhadap suporter atau pihak lain.

Pola pemolisian terhadap hooliganisme juga telah banyak dibahas dalam penelitian terdahulu. Scott & Clarke (2011) dan Goldstein (2013), dalam kajian mereka tentang Problem

Oriented Policing (POP), menekankan pentingnya pendekatan pemolisian yang bersifat preventif dan berbasis data, terutama dalam menangani masalah sosial yang berulang seperti hooliganisme. POP berfokus pada identifikasi akar masalah dan penciptaan solusi jangka panjang yang mampu mencegah terulangnya kejadian serupa. Pendekatan ini berbeda dengan metode tradisional yang sering kali hanya bersifat reaktif, karena POP melibatkan analisis mendalam mengenai penyebab masalah dan pengembangan respons yang lebih tepat sasaran.

Eck & Spelman (2013) dalam Lubis & Arisca (2022). mengembangkan Model SARA (Scanning, Analysis, Response, Assessment) sebagai metode untuk menerapkan POP dalam mengatasi masalah keamanan secara komprehensif dan sistematis (Lubis & Arisca, 2022). Dalam konteks hooliganisme, Milojevic et al. menggunakan Model SARA untuk memindai area-area rawan konflik antar suporter, menganalisis faktor-faktor yang memicu kekerasan, mengembangkan respons berbasis data yang efektif, dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pola yang diterapkan. Dengan menerapkan POP dan Model SARA, aparat kepolisian dapat merancang pola pemolisian yang lebih responsif dan adaptif terhadap karakteristik lokal serta dinamika sosial supporter (Simonović, 2013).

Lubis & Arisca (2022) menunjukkan bahwa POP yang diterapkan dengan pendekatan kolaboratif antara polisi dan komunitas dapat lebih efektif dalam mengendalikan kekerasan kolektif. Dengan melibatkan pemimpin suporter dalam proses perencanaan keamanan, polisi dapat mengurangi ketegangan dan memperkuat kerjasama dengan komunitas suporter. Serdyuk & Markovska (2019) menyoroti pentingnya adaptasi lokal dalam menerapkan POP untuk konteks yang spesifik, seperti hooliganisme suporter sepak bola. Mereka menemukan bahwa ketika polisi menyesuaikan pola pemolisian mereka dengan karakteristik unik suatu wilayah atau kelompok, efektivitas pemolisian meningkat secara signifikan. Penyesuaian lokal ini relevan untuk Surabaya, di mana Bonek Mania memiliki budaya dan dinamika sosial tersendiri.

Studi oleh Hermawan (2021) menyarankan bahwa keterlibatan komunitas suporter dalam perencanaan keamanan pertandingan dapat mengurangi kecenderungan bentrokan antar suporter dan antara suporter dengan aparat keamanan. Keterlibatan ini memungkinkan para suporter untuk merasa lebih dihargai dan didengarkan, serta menciptakan rasa tanggung jawab terhadap keamanan bersama. Ketika polisi berkolaborasi dengan komunitas suporter, baik dalam sosialisasi maupun perencanaan keamanan, ada kemungkinan besar bahwa konflik dapat diminimalisir dan tindakan preventif menjadi lebih efektif.

Penelitian ini mencakup analisis mendalam terhadap pola pemolisian yang diterapkan oleh Polrestabes Surabaya dalam mengendalikan perilaku hooliganisme yang dilakukan oleh suporter Bonek Mania, terutama setelah diberlakukannya Perpol No. 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga. Berdasarkan insiden-insiden hooliganisme yang sering terjadi di Surabaya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pola pemolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), khususnya di area yang rawan konflik selama berlangsungnya pertandingan sepak bola.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup tiga aspek utama: preemtif dan preventif. Aspek preemtif berfokus pada berbagai upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya untuk membina hubungan baik dengan komunitas suporter Bonek Mania. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang dapat mencegah potensi konflik. Upaya preemtif ini meliputi sosialisasi terhadap suporter mengenai pentingnya sportivitas, kampanye kesadaran akan bahaya kekerasan dalam sepak bola, serta edukasi nilai-nilai positif kepada anggota komunitas

suporter. Dalam aspek ini, penelitian akan mengamati bagaimana Polrestabes Surabaya memperkuat hubungan antara polisi dan suporter, menciptakan pemahaman bersama yang diharapkan mampu mencegah potensi konflik di masa depan.

Aspek preventif dalam penelitian ini mengkaji langkah-langkah yang lebih langsung dalam mengantisipasi hooliganisme, terutama di lokasi pertandingan atau area strategis yang sering menjadi tempat berkumpulnya suporter. Tindakan preventif mencakup peningkatan pengawasan di sekitar stadion, penempatan petugas keamanan di titik-titik rawan, serta pemantauan pergerakan suporter guna mencegah bentrokan. Selain itu, penelitian akan mengevaluasi sejauh mana Polrestabes Surabaya menerapkan pendekatan persuasif, seperti komunikasi langsung dengan komunitas suporter mengenai rencana pengamanan, untuk menciptakan rasa keterlibatan dan menjaga ketertiban bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku hooliganisme yang dilakukan oleh Bonek Mania di wilayah Polrestabes Surabaya, serta mengevaluasi pola pemolisian yang diterapkan dalam mengendalikan kekerasan tersebut melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Dengan mempelajari karakteristik, motivasi, dan faktor sosial yang mempengaruhi perilaku hooliganisme, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemolisian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi strategis bagi Polrestabes Surabaya untuk meningkatkan efektivitas pemolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, baik bagi masyarakat maupun bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan sepak bola di kota tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami fenomena hooliganisme oleh Bonek Mania dan pola pemolisian yang diterapkan oleh Polrestabes Surabaya. Fokus penelitian adalah pada praktik pemolisian preemtif, preventif, dan represif serta efektivitas pendekatan Problem Oriented Policing (POP) dalam mengelola konflik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumen, untuk memastikan validitas dan reliabilitas data melalui triangulasi sumber dan metode. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan menggunakan model analisis kualitatif yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor sosial yang mempengaruhi perilaku hooliganisme dan menilai respons kepolisian terhadapnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pola pemolisian yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam mengendalikan perilaku hooliganisme oleh Bonek Mania, dengan menitikberatkan pada pendekatan Problem Oriented Policing (POP) dan integrasi teori-teori sosial seperti Teori Kontrol Sosial, Teori Aktivitas Rutin, dan Teori Konformitas. Melalui kajian ini, ditelaah bagaimana strategi preemtif, preventif, dan represif diterapkan secara sistematis guna meredam potensi konflik, membangun komunikasi dengan komunitas suporter, serta menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya ketertiban. Penelitian ini juga mengkaji dampak nyata dari pola pemolisian tersebut terhadap perubahan perilaku Bonek, baik dalam bentuk

kepatuhan terhadap aturan, identifikasi terhadap norma baru, maupun internalisasi nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab sosial.

Problem Oriented Policing (POP) dalam Penanganan Hooliganisme di Surabaya

Polrestabes Surabaya telah menerapkan berbagai langkah dalam menangani perilaku hooliganisme yang dilakukan oleh Bonek Mania. Pendekatan yang diterapkan berfokus pada identifikasi masalah yang terjadi di lapangan, analisis akar penyebab, penerapan strategi berbasis pencegahan, dan evaluasi dampaknya terhadap komunitas suporter. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa pendekatan yang lebih mengutamakan komunikasi dan pencegahan telah lebih efektif dibandingkan dengan metode pemolisian konvensional yang mengandalkan penindakan hukum semata.

Kapolrestabes Surabaya, KBP Luthfi Sulistiawan, menegaskan bahwa pola pendekatan terhadap Bonek Mania tidak bisa hanya sebatas penegakan hukum.

"Hooliganisme ini bukan hanya sekadar masalah keamanan, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial dan budaya suporter. Kalau kita hanya fokus pada penindakan, akar masalahnya tidak akan terselesaikan. Maka, kita mencoba memahami pola perilaku suporter dan mencari solusi yang bisa diterapkan secara jangka panjang," jelasnya.

Menurutnya, pendekatan kepolisian dalam menangani hooliganisme dibagi dalam tiga tahap utama, yaitu upaya preemtif, preventif, dan represif.

"Kami menerapkan pendekatan yang berlapis. Upaya preemtif dilakukan oleh Sat Intelkam dan Sat Binmas, yang bertugas mendeteksi potensi konflik sejak dini dan memberikan edukasi kepada suporter. Upaya preventif dilakukan oleh Sat Sabhara dan Sat Lantas, yang memastikan keamanan di stadion dan perjalanan suporter agar tidak terjadi bentrokan. Sementara untuk penindakan hukum, itu menjadi tugas dari Sat Reskrim, yang menangani kasus-kasus yang sudah masuk dalam kategori tindak pidana," jelasnya.

Salah satu langkah awal yang dilakukan kepolisian adalah memetakan lokasi rawan konflik. Kabag Ops Polrestabes Surabaya, AKBP Wibowo, menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah mengidentifikasi beberapa titik yang sering menjadi lokasi bentrokan antara Bonek dan pihak lain.

"Kami sudah mengkaji pola kejadian sebelumnya dan menemukan bahwa ada beberapa titik yang selalu menjadi lokasi rawan. Stadion, stasiun, terminal, dan jalur perjalanan suporter menjadi tempat di mana gesekan sering terjadi. Selain itu, sekarang banyak juga konflik yang berawal dari media sosial, sehingga pemantauan di dunia digital juga harus dilakukan," ungkapnya.

Dalam menganalisis penyebab utama hooliganisme, kepolisian menemukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku suporter. Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya, AKBP Edi Hartono, menyoroti bahwa faktor internal dalam komunitas suporter dan faktor eksternal dari pengelolaan sepak bola nasional turut berperan dalam memicu berbagai insiden.

"Bonek memiliki identitas yang sangat kuat, dan ini yang membuat mereka memiliki solidaritas yang luar biasa. Tapi, di sisi lain, solidaritas ini juga bisa memicu reaksi berlebihan ketika ada teman mereka yang terlibat konflik. Selain itu, banyak dari mereka yang merasa klubnya diperlakukan tidak adil, baik dari jadwal pertandingan maupun keputusan wasit. Rasa ketidakadilan ini kemudian melahirkan kemarahan kolektif, yang kadang berujung pada aksi di luar batas," katanya.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, kepolisian menerapkan strategi berbasis pencegahan dan penindakan yang lebih terukur. Salah satu langkah utama yang

diterapkan adalah meningkatkan komunikasi dengan komunitas Bonek. KBP Luthfi Sulistiawan menegaskan bahwa dialog dan keterlibatan suporter dalam menjaga keamanan jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat represif.

"Kami sekarang lebih sering mengadakan pertemuan dengan Korlap Bonek sebelum pertandingan. Kita jelaskan bagaimana pengamanan akan dilakukan, kita bahas aturan yang harus dipatuhi, dan kita cari solusi bersama jika ada potensi masalah. Pendekatan ini membuat mereka lebih memahami bagaimana harus bersikap di stadion," ujarnya.

Selain komunikasi yang lebih baik, kepolisian juga menerapkan strategi pencegahan langsung, seperti pengawalan perjalanan suporter dan pemantauan intensif di stadion. AKBP Wibowo menjelaskan bahwa kepolisian kini lebih aktif dalam bekerja sama dengan panitia pertandingan dan manajemen klub untuk memastikan pengamanan lebih baik.

"Kami sudah menetapkan standar pengamanan khusus untuk pertandingan berisiko tinggi. Salah satunya adalah pengawalan ketat di jalur perjalanan suporter agar mereka tidak bertemu dengan kelompok lain yang bisa memicu konflik. Di dalam stadion, kami juga memastikan tidak ada celah bagi suporter yang tidak memiliki tiket untuk masuk, karena ini sering kali menjadi penyebab gesekan dengan aparat," katanya.

Namun, dalam kondisi tertentu, tindakan tegas tetap harus dilakukan terhadap pelaku yang melanggar aturan atau melakukan aksi anarkis. AKBP Edi Hartono mencontohkan insiden di Jembatan Suramadu pada 3 Juni 2024, di mana kepolisian akhirnya harus melakukan penindakan hukum terhadap 18 suporter yang terbukti terlibat dalam aksi anarkis.

"Kami tetap berupaya mengedepankan pencegahan, tapi ketika ada kasus seperti ini, di mana suporter melakukan kerusakan dan mengganggu ketertiban umum, maka penindakan tegas harus dilakukan. Kami tidak bisa membiarkan tindakan anarkis terus berulang tanpa ada konsekuensi hukum," tegasnya.

Setelah penerapan pola pemolisian berbasis komunikasi dan pencegahan, kepolisian melakukan evaluasi terhadap efektivitas strategi ini. Dari hasil pemantauan, ditemukan bahwa jumlah insiden yang melibatkan suporter mengalami penurunan cukup signifikan sejak tahun 2022. AKBP Wibowo menyatakan bahwa pendekatan yang berbasis komunikasi telah membantu kepolisian dalam mengantisipasi berbagai konflik sebelum terjadi.

"Kalau kita lihat datanya, jumlah bentrokan yang melibatkan Bonek menurun dalam dua tahun terakhir. Ini karena mereka sekarang lebih memahami aturan dan ada komunikasi yang lebih baik antara suporter dan kepolisian. Kita juga semakin aktif memantau media sosial untuk mendeteksi potensi provokasi sebelum berkembang menjadi insiden besar," jelasnya.

Kesimpulan dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pola pemolisian yang berbasis komunikasi, pencegahan, dan penegakan hukum yang terarah telah lebih efektif dalam mengendalikan perilaku hooliganisme oleh Bonek Mania. Dengan semakin meningkatnya kesadaran di kalangan suporter serta upaya kepolisian dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan komunitas suporter, angka insiden yang melibatkan Bonek dapat terus ditekan.

"Kami ingin memastikan bahwa Bonek bisa tetap mendukung Persebaya dengan penuh semangat, tetapi dengan cara yang lebih tertib dan dewasa. Kalau pendekatan ini terus diterapkan, kita bisa melihat transformasi suporter ke arah yang lebih positif," pungkaskan KBP Luthfi Sulistiawan.

Meskipun tantangan masih ada, keberlanjutan strategi ini menjadi kunci dalam membantu komunitas Bonek berkembang menjadi kelompok suporter yang lebih tertib, sportif, dan bertanggung jawab dalam mendukung Persebaya Surabaya.

Berdasarkan temuan penelitian mengenai Problem Oriented Policing (POP) dalam Penanganan Hooliganisme di Surabaya, dapat dianalisis menggunakan model SARA (Scanning, Analysis, Response, Assessment) sebagai kerangka kerja dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah hooliganisme oleh Bonek Mania.

1. Scanning (Pemindaian)

Pemindaian dilakukan untuk mengidentifikasi masalah utama yang berulang terkait hooliganisme Bonek. Berdasarkan pernyataan Kapolrestabes Surabaya, KBP Luthfi Sulistiawan, kepolisian menemukan bahwa hooliganisme bukan hanya permasalahan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial dan budaya dalam komunitas suporter. Dari pemetaan yang dilakukan, ditemukan bahwa titik-titik rawan konflik sering terjadi di stadion, stasiun, terminal, dan jalur perjalanan suporter, serta meningkatnya potensi konflik akibat provokasi di media sosial. Hal ini sejalan dengan konsep POP yang menekankan pentingnya mengidentifikasi pola kejadian untuk memahami sumber masalah yang lebih dalam.

2. Analysis (Analisis)

Setelah mengidentifikasi pola kejadian, dilakukan analisis untuk memahami akar penyebab hooliganisme di kalangan Bonek. Dari hasil wawancara dengan Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya, AKBP Edi Hartono, ditemukan bahwa solidaritas tinggi dalam komunitas Bonek sering kali memicu aksi kolektif yang agresif, terutama saat mereka merasa klubnya diperlakukan tidak adil. Selain itu, ketidakpuasan terhadap jadwal pertandingan, keputusan wasit, serta perlakuan federasi sepak bola menjadi faktor eksternal yang memperburuk situasi. Konsep POP menekankan pentingnya memahami faktor-faktor pemicu kejahatan untuk dapat merancang strategi pencegahan yang efektif. Oleh karena itu, kepolisian tidak hanya melihat hooliganisme sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai masalah sosial yang perlu diatasi dengan pendekatan berbasis komunitas.

3. Response (Respons)

Merespons hasil analisis yang dilakukan, Polrestabes Surabaya menerapkan pendekatan berbasis komunikasi dan pencegahan, bukan hanya penindakan. Seperti yang disampaikan KBP Luthfi Sulistiawan, kepolisian membagi upaya pemolisian dalam tiga tahapan utama: preemtif, preventif, dan represif.

- a. **Preemtif** dilakukan oleh Sat Intelkam dan Sat Binmas, yang bertugas mendeteksi potensi konflik sejak dini serta memberikan edukasi kepada suporter. Ini mencerminkan strategi pencegahan jangka panjang dalam POP yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran.
- b. **Preventif** dilakukan oleh Sat Sabhara dan Sat Lantas, yang bertanggung jawab atas keamanan di stadion dan perjalanan suporter. Langkah ini menunjukkan upaya mengendalikan situasi sebelum insiden terjadi.
- c. **Represif** dilakukan oleh Sat Reskrim, yang bertugas menangani kasus-kasus yang sudah masuk kategori tindak pidana. Ini merupakan tindakan terakhir yang diambil jika pendekatan preemtif dan preventif tidak berhasil.

Selain itu, dalam pengamanan pertandingan, di dalam stadion hanya dilakukan oleh petugas Pamtup (Pengamanan Tertutup) yang tidak mengenakan seragam polisi. Langkah ini dinilai lebih efektif dalam menjaga ketertiban tanpa memicu gesekan langsung dengan suporter.

Dalam konteks POP, strategi ini menunjukkan bahwa Polrestabes Surabaya tidak hanya bertindak reaktif, tetapi juga berupaya mengelola konflik dengan pendekatan berbasis pencegahan dan kolaborasi dengan komunitas suporter. Hal ini sesuai dengan konsep POP yang menekankan pentingnya solusi yang lebih strategis dan berkelanjutan.

4. Assessment (Penilaian)

Berdasarkan analisis menggunakan pendekatan Problem Oriented Policing (POP), dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Polrestabes Surabaya dalam menangani hooliganisme oleh Bonek telah sesuai dengan prinsip dasar POP, yaitu mengidentifikasi akar masalah, menganalisis faktor penyebab, merancang strategi respons yang efektif, serta melakukan evaluasi untuk perbaikan di masa depan. Dengan adanya pendekatan yang lebih sistematis ini, kepolisian berhasil menekan angka insiden hooliganisme dan membangun hubungan yang lebih baik dengan komunitas suporter, yang menjadi langkah awal dalam transformasi budaya suporter yang lebih tertib dan bertanggung jawab.

Pola Pemolisian Preemptif dalam Mengatasi Hooliganisme

Polrestabes Surabaya telah menerapkan berbagai langkah dalam menangani hooliganisme yang dilakukan oleh Bonek Mania, salah satunya melalui pendekatan preemptif yang menitikberatkan pada deteksi dini, edukasi kepada suporter, serta peningkatan komunikasi dengan komunitas Bonek. Penelitian ini menemukan bahwa strategi preemptif lebih efektif dalam mencegah eskalasi konflik dibandingkan dengan pendekatan yang hanya mengandalkan penindakan hukum setelah kejadian terjadi.

Kasat Intelkam Polrestabes Surabaya, AKBP Edi Hartono, menjelaskan bahwa upaya preemptif yang dilakukan oleh kepolisian berfokus pada pengumpulan informasi dan pemantauan situasi sebelum pertandingan berlangsung.

"Kami tidak hanya bertindak ketika ada insiden, tetapi jauh sebelum itu, kami sudah melakukan pemetaan potensi konflik. Kami memantau pergerakan suporter, melihat bagaimana dinamika yang berkembang di media sosial, dan melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh Bonek. Semua ini dilakukan agar kita bisa mencegah masalah sebelum terjadi," katanya.

Selain pemantauan digital dan analisis risiko, pendekatan preemptif juga dilakukan dengan menjalin komunikasi yang intensif dengan komunitas Bonek, terutama melalui unsur pimpinan dan Sat Intelkam Polrestabes Surabaya, yang selama ini dikenal memiliki hubungan dekat dengan para suporter.

Kasat Binmas Polrestabes Surabaya, AKBP Sutiono, menekankan bahwa edukasi merupakan salah satu kunci dalam strategi preemptif kepolisian untuk mencegah hooliganisme.

"Kami tidak ingin hanya bertindak saat sudah ada gangguan. Pendekatan yang kami lakukan adalah bagaimana kita bisa memberi pemahaman kepada suporter tentang batasan dalam mendukung tim. Oleh karena itu, kami sering melakukan penyuluhan dan pertemuan informal dengan Bonek agar mereka lebih memahami peran mereka sebagai suporter yang bertanggung jawab," ujarnya.

Dari pihak suporter, pendekatan preemptif yang dilakukan kepolisian mendapat respons positif. Cak Alek, Fans Manajer Persebaya, menyatakan bahwa komunikasi antara kepolisian dan komunitas Bonek sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Dulu kami melihat polisi sebagai pihak yang selalu berhadapan dengan suporter, tapi sekarang beda. Sekarang, ada banyak dialog yang dilakukan sebelum pertandingan. Sat Intelkam dan pimpinan kepolisian seperti Kapolrestabes dan Kabag Ops banyak

membantu kami. Mereka sering menjelaskan bagaimana aturan di stadion, bagaimana menjaga ketertiban, dan mereka juga memfasilitasi hubungan antara Bonek dan aparat keamanan," katanya.

Salah satu upaya yang dianggap berhasil dalam strategi preemtif kepolisian adalah kampanye #NoTicketNoGame, yang pertama kali diviralkan oleh Sat Intelkam untuk mendidik suporter agar selalu membeli tiket resmi dan tidak berusaha masuk stadion secara ilegal. Cak Cong, Korlap Green Nord, menjelaskan bahwa kampanye ini berhasil mengubah pola pikir banyak suporter.

"Gerakan #NoTicketNoGame awalnya banyak yang menentang, karena masih ada budaya lama di mana orang merasa bisa masuk stadion tanpa tiket. Tapi setelah Sat Intelkam ikut membantu memviralkan gerakan ini, banyak suporter yang akhirnya sadar bahwa mendukung tim harus dengan cara yang benar. Mereka juga sering mengadakan pertemuan informal dengan kami untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi Bonek," ujarnya.

Selain itu, kepolisian juga sering turun langsung ke komunitas suporter untuk melakukan pendekatan sosial. Cak Bojes, Ketua Bonek Disaster Response Team (BDRT), mengungkapkan bahwa dalam beberapa kesempatan, kepolisian, terutama Sat Intelkam, turut serta dalam kegiatan sosial yang dilakukan oleh Bonek.

"Kami di BDRT sering turun ke lapangan untuk membantu korban bencana atau melakukan kegiatan sosial lainnya. Kadang, pihak kepolisian juga ikut membantu, mereka ikut terlibat dalam aksi kemanusiaan yang kami lakukan. Ini membuat hubungan antara Bonek dan polisi jadi lebih baik. Sat Intelkam dan unsur pimpinan seperti Kapolres dan Kabag Ops memang yang paling dekat dengan kami," katanya.

Selain melalui kampanye dan dialog, kepolisian juga memberikan pendampingan jika ada anggota Bonek yang berurusan dengan hukum. Cak Cong menambahkan bahwa Sat Intelkam sering membantu dalam hal ini, bukan dalam bentuk intervensi hukum, tetapi memberikan pendampingan agar kasus tersebut bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik.

"Kalau ada teman-teman Bonek yang kena masalah, mereka selalu ada. Mereka tidak membela kalau memang salah, tapi mereka membantu agar prosesnya bisa berjalan dengan baik. Ini yang membuat kami merasa bahwa ada komunikasi yang lebih baik sekarang dibandingkan dulu," ujarnya.

Hasil observasi yang dilakukan di berbagai pertemuan antara Bonek dan kepolisian menunjukkan bahwa kedekatan antara komunitas Bonek dan Sat Intelkam sangat kuat. Ketika Sat Intelkam yang memanggil, Bonek lebih bersedia untuk hadir dan mendengarkan dibandingkan ketika pemanggilan dilakukan oleh unit kepolisian lainnya. Observasi ini menunjukkan bahwa Sat Intelkam telah membangun kepercayaan di kalangan suporter, yang membuat mereka lebih terbuka untuk berkomunikasi dan berdiskusi terkait keamanan pertandingan.

Pendekatan preemtif juga diterapkan melalui pelibatan tokoh-tokoh komunitas dalam mengontrol perilaku suporter di tribun. Cak Alek menyebutkan bahwa banyak edukasi yang diberikan kepada anggota Bonek disampaikan oleh sesama suporter, bukan oleh kepolisian secara langsung.

"Anak-anak di tribun lebih mudah menerima kalau informasi itu datang dari kita sendiri, bukan dari polisi langsung. Makanya sekarang sebelum pertandingan besar, kita juga ikut mengingatkan mereka, baik lewat media sosial maupun saat berkumpul sebelum berangkat ke stadion," jelasnya.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa dengan adanya pola pemolisian preemtif, jumlah insiden hooliganisme mengalami penurunan. Data kepolisian menunjukkan bahwa setelah diterapkan pendekatan preemtif berbasis komunikasi dan edukasi, frekuensi bentrokan suporter dengan aparat keamanan maupun dengan suporter lawan semakin berkurang.

Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi strategi preemtif ini. AKBP Edi Hartono menyatakan bahwa masih ada kelompok kecil dalam komunitas Bonek yang tetap resisten terhadap pendekatan edukatif dan lebih memilih aksi konfrontatif dalam menanggapi situasi tertentu.

"Tidak semua suporter bisa langsung berubah. Masih ada yang lebih memilih aksi langsung daripada dialog. Ini yang masih kita upayakan dengan lebih banyak pendekatan dan pelibatan tokoh-tokoh yang mereka hormati dalam komunitas," ujarnya.

Selain itu, meskipun upaya pemantauan media sosial sudah dilakukan, masih ada kendala dalam menekan provokasi dan penyebaran informasi yang bisa memicu konflik. Cak Cong mengungkapkan bahwa banyak bentrokan yang terjadi berawal dari unggahan provokatif di media sosial.

"Kadang masalah kecil bisa jadi besar gara-gara media sosial. Makanya sekarang kita juga berusaha menenangkan teman-teman kalau ada provokasi, supaya tidak langsung bereaksi berlebihan," jelasnya.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola pemolisian preemtif yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya telah membawa dampak positif dalam meredam potensi hooliganisme di kalangan Bonek. Dengan adanya pemantauan dini, peningkatan komunikasi dengan komunitas suporter, serta pendekatan berbasis edukasi dan kampanye kesadaran, kepolisian berhasil menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi suporter Persebaya untuk mendukung tim mereka dengan cara yang lebih tertib dan sportif.

Pendekatan pemolisian preemtif yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam menangani hooliganisme oleh Bonek Mania dapat dianalisis menggunakan Teori Kontrol Sosial yang dikemukakan oleh Edward Alsworth Ross. Teori ini menjelaskan bagaimana masyarakat mempertahankan ketertiban dengan mengendalikan perilaku menyimpang melalui kontrol sosial formal dan informal.

Kontrol Sosial Formal dalam Pencegahan Hooliganisme

Polrestabes Surabaya menerapkan kontrol sosial formal melalui langkah-langkah preemtif yang menitikberatkan pada deteksi dini, edukasi kepada suporter, dan peningkatan komunikasi dengan komunitas Bonek. Institusi kepolisian memiliki kewenangan dalam mengatur dan menegakkan aturan demi menjaga ketertiban dalam lingkungan suporter.

Dalam praktiknya, Sat Intelkam Polrestabes Surabaya berperan sebagai unit yang melakukan pemantauan terhadap dinamika suporter, menganalisis potensi konflik, serta mengidentifikasi pola perilaku yang dapat memicu gangguan keamanan. Pendekatan ini memungkinkan kepolisian untuk mencegah insiden sebelum terjadi, sehingga strategi keamanan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi lebih kepada mengelola risiko sejak dini.

Selain itu, Sat Binmas juga turut berperan dalam memberikan edukasi kepada suporter, terutama dalam menanamkan pemahaman tentang batasan perilaku yang dapat diterima di stadion maupun dalam mendukung tim. Strategi edukasi ini berfungsi sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai baru yang dapat mencegah perilaku anarkis di kalangan suporter.

Dengan adanya edukasi yang dilakukan sebelum pertandingan, banyak suporter yang mulai memahami pentingnya menjaga ketertiban selama pertandingan berlangsung.

Sebagai bagian dari kontrol formal, kampanye #NoTicketNoGame menjadi salah satu contoh bagaimana institusi kepolisian mengarahkan perilaku suporter melalui regulasi yang lebih ketat terhadap akses masuk ke stadion. Upaya ini bertujuan untuk menghilangkan kebiasaan masuk tanpa tiket yang sering kali menjadi pemicu gesekan antara suporter dan aparat keamanan. Keberhasilan kampanye ini menunjukkan bahwa aturan yang diterapkan dengan strategi komunikasi yang tepat dapat menciptakan perubahan perilaku yang lebih positif di kalangan suporter.

Kontrol Sosial Informal dalam Pembentukan Norma Baru

Selain melalui regulasi dan kebijakan formal, pendekatan preemtif yang dilakukan kepolisian juga memanfaatkan kontrol sosial informal melalui komunikasi intensif dengan komunitas Bonek. Kontrol sosial informal bekerja melalui pengaruh kelompok, budaya komunitas, dan hubungan interpersonal, yang sering kali lebih efektif dalam mengubah perilaku individu dibandingkan dengan sanksi hukum semata.

Pendekatan ini terlihat dalam bagaimana kepolisian membangun hubungan dekat dengan Korlap Bonek dan tokoh-tokoh senior dalam komunitas suporter. Dalam interaksi ini, kepolisian tidak bertindak sebagai otoritas yang menekan suporter, melainkan sebagai mitra dalam menjaga ketertiban bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suporter lebih bersedia menerima aturan jika aturan tersebut disampaikan oleh orang yang mereka hormati dalam komunitas mereka sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan Korlap dan tokoh senior dalam menyampaikan pesan-pesan keamanan menjadi langkah yang efektif dalam mengubah persepsi suporter terhadap kepolisian.

Selain itu, kepolisian juga terlibat dalam berbagai aktivitas sosial bersama komunitas Bonek, seperti kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Bonek Disaster Response Team (BDRT). Partisipasi kepolisian dalam kegiatan ini memperkuat hubungan sosial yang lebih baik antara aparat keamanan dan suporter, sehingga menciptakan kepercayaan yang lebih besar terhadap upaya pemolisian preemtif. Kepercayaan ini penting karena memungkinkan kepolisian untuk lebih mudah melakukan intervensi saat terjadi potensi konflik, mengingat suporter sudah menganggap aparat sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas.

Pendekatan informal ini juga terlihat dalam bagaimana kepolisian memberikan pendampingan bagi anggota suporter yang berurusan dengan hukum, bukan untuk mengintervensi proses hukum, tetapi untuk memastikan bahwa penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan cara yang lebih baik dan adil. Dengan adanya pendekatan ini, suporter yang sebelumnya memiliki sikap antipati terhadap kepolisian mulai melihat aparat keamanan sebagai pihak yang dapat membantu mereka, bukan hanya sebagai pihak yang bertindak represif.

Dampak Kontrol Sosial terhadap Perubahan Perilaku Suporter

Implementasi strategi preemtif yang menggabungkan kontrol sosial formal dan informal telah menunjukkan penurunan jumlah insiden hooliganisme dalam komunitas Bonek. Dengan adanya pemantauan yang lebih ketat oleh kepolisian dan penerapan norma baru melalui edukasi dan komunikasi, banyak suporter yang mulai mengubah cara mereka dalam mendukung tim, dari yang sebelumnya cenderung konfrontatif menjadi lebih tertib dan sadar akan konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

Meskipun strategi ini telah membawa dampak positif, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama dalam menghadapi kelompok kecil dalam komunitas Bonek yang tetap resisten terhadap pendekatan edukatif. Beberapa anggota suporter masih lebih memilih aksi konfrontatif dibandingkan dengan dialog atau pendekatan yang lebih persuasif. Ini menunjukkan bahwa meskipun norma baru telah mulai diterima oleh sebagian besar komunitas suporter, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam merangkul kelompok yang belum terpengaruh oleh pendekatan preemtif.

Selain itu, provokasi di media sosial masih menjadi faktor utama dalam memicu konflik, yang menunjukkan bahwa strategi pemolisian preemtif juga harus semakin aktif dalam memantau dan mengelola narasi yang berkembang di platform digital. Media sosial sering kali menjadi pemicu reaksi emosional yang cepat di kalangan suporter, sehingga memerlukan intervensi dini sebelum provokasi berkembang menjadi tindakan di dunia nyata.

Pendekatan preemtif dalam mengatasi hooliganisme yang dilakukan oleh Polrestaes Surabaya dapat dianalisis sebagai kombinasi dari kontrol sosial formal dan informal. Melalui regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian, norma-norma baru mulai diterapkan untuk membatasi perilaku menyimpang suporter. Di sisi lain, pendekatan informal melalui komunikasi yang lebih erat dengan komunitas suporter, keterlibatan dalam kegiatan sosial, dan pembentukan kemitraan dengan Korlap Bonek menjadi faktor penting dalam menciptakan perubahan budaya di dalam komunitas suporter.

Strategi ini telah menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka hooliganisme, tetapi masih menghadapi tantangan dalam menangani kelompok suporter yang tetap resisten terhadap perubahan. Oleh karena itu, upaya edukasi dan komunikasi masih harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa perubahan perilaku yang diharapkan dapat berlangsung secara menyeluruh di dalam komunitas Bonek. Dengan adanya keseimbangan antara kontrol sosial formal dan informal, transformasi Bonek Mania menjadi suporter yang lebih tertib dan sportif dapat terus berlanjut.

Pola Pemolisian Preventif dalam Mengantisipasi Hooliganisme

Polrestaes Surabaya menerapkan pola pemolisian preventif yang berfokus pada pengamanan saat pertandingan, dengan pengamanan yang dipimpin oleh Kabag Ops Polrestaes Surabaya sebagai Karendal Ops. Pengamanan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Polda Jawa Timur, TNI, dan Pemkot Surabaya, dan dibagi menjadi empat ring: Ring 1 (dalam stadion), Ring 2 (area parkir VIP dan depan stadion), Ring 3 (seputaran stadion), dan Ring 4 (akses menuju stadion). Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penempatan personel dan mencegah gangguan keamanan. Selain itu, koordinasi H-7 sebelum pertandingan dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan, yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Hasil wawancara dengan Kabag Ops Polrestaes Surabaya, AKBP Wibowo, menjelaskan bahwa pengamanan tidak hanya terfokus pada hari pertandingan. *"Kami memiliki standar operasional yang terorganisir untuk memastikan pertandingan berlangsung aman,"* katanya. Selain itu, pengamanan di dalam stadion dilakukan oleh Pamtup (Pengamanan Tertutup), dengan polisi yang berpakaian preman agar tidak memicu reaksi dari suporter. Hal ini dipandang efektif, seperti yang diungkapkan oleh Cak Bojes, Ketua Bonek Disaster Response Team (BDRT), yang mengatakan, *"Polisi berpakaian preman membuat suporter lebih nyaman dan tidak merasa diawasi secara berlebihan."*

Namun, beberapa suporter menyatakan bahwa pendekatan ini masih memiliki tantangan. Cak Cong, Korlap Green Nord, mengkritik bahwa pengamanan hanya difokuskan pada hari pertandingan dan tidak ada upaya lebih dari polisi di luar pertandingan untuk mencegah potensi gesekan. "*Pengamanan di hari pertandingan memang baik, tapi kenapa hanya saat itu saja? Polisi perlu membangun komunikasi lebih rutin,*" ungkapnya. Kritikan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih proaktif di luar pertandingan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan suporter dan mencegah potensi kerusuhan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pola pemolisian preemtif yang diterapkan oleh Polrestabes Surabaya dalam menangani hooliganisme oleh Bonek Mania telah memberikan dampak positif dalam meredam potensi kekerasan selama pertandingan. Melalui pendekatan berbasis komunikasi dan pencegahan, serta kolaborasi dengan komunitas suporter, kepolisian berhasil menciptakan kondisi yang lebih tertib dan aman di sekitar stadion. Meskipun ada tantangan dalam implementasi, seperti kelompok kecil yang tetap resisten terhadap pendekatan edukatif dan provokasi di media sosial, pola pemolisian ini terbukti efektif dalam mengurangi insiden. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya integrasi kontrol sosial formal dan informal, serta upaya berkelanjutan untuk meningkatkan hubungan antara kepolisian dan suporter guna menciptakan perubahan budaya yang lebih positif dalam mendukung tim sepak bola.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisca, F., & Lubis, A. Y. (2022). Strategi pemolisian dalam pencegahan konflik tawuran antar warga oleh Polres Metro Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(2), 17.
- Atmoko, I. J. (2015). *Analisa faktor-faktor eksistensi organisasi studi kasus konflik antara Brajamusti dengan The Maident* (Tesis doctoral, Universitas Gadjah Mada).
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Chriss, J. J. (2013). *Social control: An introduction* (2nd ed.). Polity Press.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (2014). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.
- Coser, L. A. (2010). *Sosiologi: Suatu pengantar* (H. Langgulung, Trans.). Rajawali Press. (Karya asli diterbitkan 1977)
- Eck, J. E., & Spelman, W. (2013). *Problem-solving: Problem-oriented policing in Newport News*. U.S. Department of Justice, National Institute of Justice.
- Felson, M. (2012). *Crime and everyday life* (3rd ed.). Sage Publications.
- Felson, M., & Clarke, R. V. (2013). *Opportunity makes the thief: Practical theory for crime prevention* (Home Office Police Research Series, Paper 98). Home Office.
- Garland, D. (2011). *The culture of control: Crime and social order in contemporary society*. Oxford University Press.
- Goldstein, H. (2013). Improving policing: A problem-oriented approach. *Crime & Delinquency*, 25(2), 236–258.
- Goldstein, H. (2012). *Problem-oriented policing*. McGraw-Hill.
- Hermawan, A. P. (2023). *Urgentitas pembenahan regulasi keamanan dan keselamatan PSSI 2021 pada penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Hoggett, J., & Stott, C. (2020). Crowd dynamics and public order policing: The integration of theory, policy and practice. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 14(4), 745–758.
- Innes, M. (2013). *Understanding social control: Deviance, crime and social order*. Open University Press.
- Irsan, K. (2015). Polisi, kekerasan dan senjata api: Tantangan pemolisian di era demokrasi. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 290–309.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Milojevic, S., & Jankovic, B. (2019). *Police measures and actions in confronting football hooliganism in some European countries*. Academy of Criminalistic and Police Studies.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Ed. revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson Education Limited.
- Patton, M. Q. (2012). *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Reicher, S. (2011). The psychology of crowd dynamics. In M. A. Hogg & R. S. Tindale (Eds.), *Blackwell handbook of social psychology: Group processes* (pp. 182–208). Blackwell.
- Scott, M. S., & Clarke, R. V. (2011). *Problem-oriented policing: Reflections on the first 20 years*. U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services.
- Serdyuk, A., & Markovska, A. (2019). *Problem-oriented policing in Kharkiv Region: First steps of implementation*. Kharkiv National University of Internal Affairs.
- Simonović, B. (2019). *Preventive measures to counter hooliganism at sports events*. Belgrade: Academy of Criminalistic and Police Studies.
- Spaaij, R. (2016). *Understanding football hooliganism: A comparison of six Western European football clubs*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Stott, C., & Pearson, G. (2017). *Football hooliganism: Policing and the war on the English disease*. Pennant Books.
- Stott, C., & Reicher, S. (2016). The impact of the crowd: Crowd psychology and the dynamics of social order. *Annual Review of Law and Social Science*, 12, 91–108.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Waddington, D. P., Jones, K., & Critcher, C. (2013). *Flashpoints: Studies in public disorder*. Routledge.
- Wibowo, A. (2018). Pop culture, identity conflict, and chaos: Studies on the culture and identity of Viking and Jakmania's supporters in the Indonesian football industry. *Mimbar Pendidikan*, 3(2), 149–168.
- Wirutomo, P. (2022). *Imajinasi sosiologi: Pembangunan sosial*. Penerbit Buku Kompas.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)